

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis mekanisme penegakan hukum yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi, khususnya Harimau Sumatera, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui studi kasus Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2022/PN Str. Permasalahan yang dibahas mencakup kewenangan Polisi Kehutanan dalam penegakan hukum dan mekanisme yang diterapkan dalam menangani kasus perdagangan satwa yang dilindungi. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis dokumen hukum dan wawancara dengan aparat penegak hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polisi Kehutanan memiliki kewenangan khusus berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1990 dan PP Nomor 23 Tahun 2021 untuk melakukan pencegahan, penindakan, dan penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi. Mekanisme penegakan hukum yang ada sudah efektif, tetapi tantangan utama terletak pada perubahan modus operandi perdagangan yang kini memanfaatkan platform digital, sehingga memerlukan peningkatan kapasitas teknologi dan sinergi antar lembaga penegak hukum. Keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada profesionalisme Polisi Kehutanan, kapasitas sumber daya manusia, dan dukungan kebijakan pemerintah yang lebih komprehensif dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks.

Kata Kunci : Polisi Kehutanan, Penegakan Hukum, Perdagangan Satwa Dilindungi.